

Kiat dan Strategi Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Sebagai Bagian Dari Tri Dharma Perguruan Tinggi

Handy Aribowo, Iswati, Yudithia Dian Putra

STIE IBMT Surabaya

handy@ibmt.ac.id, iswati@ibmt.ac.id , yudith@ibmt.ac.id

Abstrak: *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah. UMKM dalam menjalankan bisnisnya memiliki banyak kendala dan hambatan, untuk itu diperlukan kiat dan strategi dalam mengatasi kendala dan hambatan yang dialami. Sebagai wujud dari TriDharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. maka pihak perguruan tinggi memerlukan kolaborasi dengan praktisi UMKM untuk membentuk Lembaga Kajian Pemberdayaan (LKP) UMKM daerah, serta perlu pula berkolaborasi dengan pihak pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan UMKM. Adapun kegiatan yang perlu dilakukan LKP UMKM Daerah dalam rangka membantu pemberdayaan UMKM seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan administrasi, pendampingan dan konsultasi manajemen, riset pasar, dan perencanaan skema pembiayaan.*

Kata Kunci : *Usaha Mikro Kecil Menengah, TriDharma Perguruan Tinggi, dan Daya Saing Perekonomian Daerah.*

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan ekonomi setiap negara adalah dapat tercapainya pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Pelaksanaan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan sejarah baru dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi

daerah, perwujudan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dimana dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah kabupaten menjadi “motor” pembangunan daerah, sedangkan pemerintah provinsi bertindak selaku koordinator pembangunan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya.

Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Daya saing daerah yang unggul mampu menggerakkan ekonomi daerah. Pemahaman dan penguasaan potensi ekonomi daerah bukan sesuatu yang mudah, begitu pula pemahaman terhadap peluang investasi di daerah. Di dalam memahami potensi dan peluang investasi yang ada di daerah memerlukan suatu pengenalan pemetaan yang tepat tentang kondisi dan karakteristik dari suatu daerah. Menurut Abdullah (2002) bahwa pemahaman yang akurat dan lengkap akan potensi daya saing yang dimiliki oleh daerahnya, suatu pemerintah daerah akan dapat dengan mudah menyusun suatu kebijakan yang benar-benar baik dan pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha di daerah yang bersangkutan.

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan ekonomi daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Salah satu publikasi yang menjadi ukuran dan referensi dari kinerja ekonomi dan iklim investasi suatu negara adalah *Global Competitiveness Index (GCI)* yang dipublikasikan oleh lembaga internasional *World Economic Forum (WEF)*. GCI dipublikasikan sejak tahun 1979 dimana merupakan ukuran daya saing setiap negara dengan menggunakan 126 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar yaitu kualitas institusi, infrastruktur, kondisi makroekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, pelatihan dan pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar keuangan, penerapan teknologi, ukuran pasar, dan kecanggihan bisnis.

Terkait dengan tingkat daya saing negara Indonesia, berdasarkan laporan dari *World Economic Forum (WEF)* tentang *Global Competitiveness Index (GCI)* 2017–2018, bahwa peringkat Indonesia berada pada peringkat ke-36 dari 137 negara, dapat dikatakan peringkat Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 5 peringkat dibandingkan *GCI* 2016–2017. Posisi Indonesia sendiri di kawasan



Asia Tenggara masih berada dibawah Singapura (peringkat 3), Malaysia (peringkat 23), dan Thailand (32).

**Tabel 1. Peringkat The Global Competitiveness Index (GCI)
2017–2018 Di Kawasan Negara ASEAN**

Negara	Peringkat Negara ASEAN	Peringkat negara dunia
Singapura	1	3
Malaysia	2	23
Thailand	3	32
Indonesia	4	36
Brunei Darussalam	5	46
Vietnam	6	55
Filipina	7	56
Laos	8	98

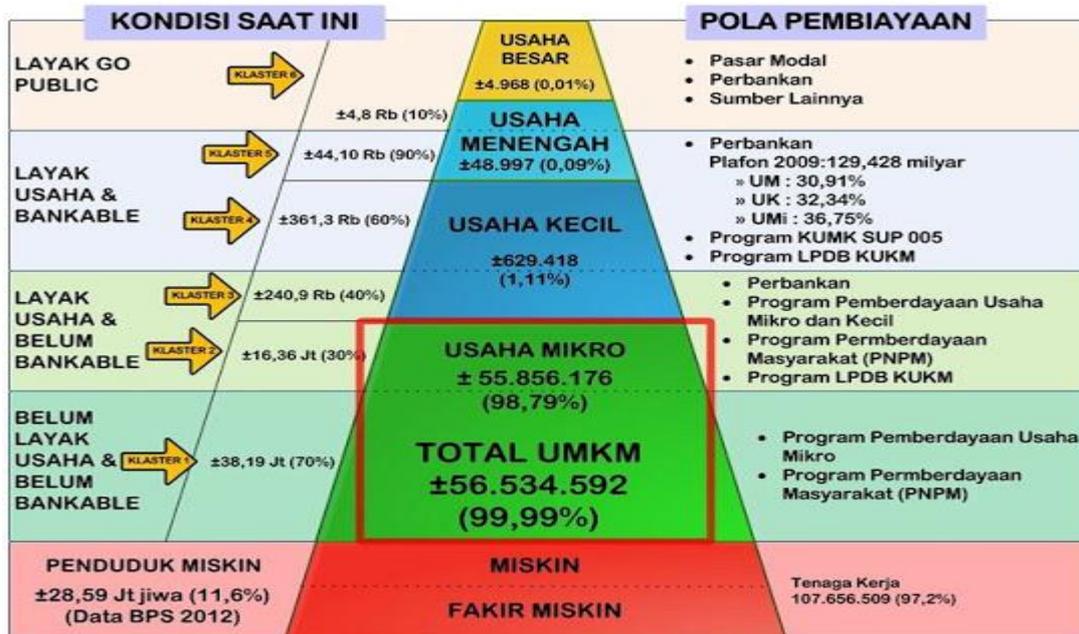
Sumber : *World Economic Forum, 2017*

Salah satu yang menjadi potensi pengembangan ekonomi disetiap daerah adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap sumber pendapatan pada masyarakat berpendapatan rendah dan penciptaan lapangan tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor khususnya di sektor industri manufaktur di Indonesia.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mempunyai daya tahan di bandingkan usaha besar sepanjang krisis ekonomi moneter tahun 1998 yang melanda Indonesia. Salah satu sebab dari daya tahan tersebut adalah sebagian besar UMKM pada saat itu menggunakan bahan baku lokal sehingga tidak mempunyai ketergantungan terhadap bahan baku impor yang harganya melambung. Pada saat krisis ekonomi moneter 1998 terjadi, produk UMKM juga masih mempunyai potensi pasar yang relatif tinggi serta biaya produksi yang rendah, sehingga harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga masih dapat dijangkau hingga golongan ekonomi lemah.

Pasca krisis ekonomi melanda Indonesia, Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah (UMKM) masih dapat tetap eksis serta tetap menjadi urat nadi serta

roda penggerak perekonomian di daerah dan nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2012 menunjukkan bahwa struktur kelembagaan pelaku ekonomi nasional yang sangat tidak berimbang. Jumlah total UMKM sebesar 56.534.592 berbanding 4.968 Usaha Besar atau 99,99% berbanding 0,01%. Penyerapan tenaga kerja langsung 107.657.509 (97,2%) berbanding 3.150.645 (2,8%). Berikut ini gambar perbandingan jumlah Usaha Besar dan UMKM secara rinci :



Gambar 1. Piramida Usaha Besar dan UMKM di Indonesia

Sumber : Tanri Abeng (2015)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ([UKM](#)) dalam keterangan tertulis pada 5 Januari 2018 mencatat pada tahun 2017 kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,48 %. Di dalam menjalankan usahanya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki bermacam permasalahan, salah satu permasalahan yang paling utama UMKM di Indonesia adalah akses permodalan, khususnya modal kerja. Adanya kebutuhan modal kerja bagi pelaku usaha UMKM, menjadikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk rawan berhubungan dengan rentenir. Selain itu, kesulitan dalam mengakses permodalan perbankan maupun lembaga lain lain seperti modal ventura bahkan koperasi pun menjadikan pelaku UMKM mau tidak mau terjebak dalam lingkaran permainan modal oleh rentenir.

Peran pemberdayaan UMKM di daerah serta mengatasi permasalahan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah daerah semata, disinilah dibutuhkan peran penting dari perguruan tinggi, dimana perguruan

tinggi memiliki akademisi yang memiliki beragam penguasaan ilmu serta metodologi yang dapat membantu di dalam memberdayakan UMKM di daerah. Kemampuan yang dimiliki para akademisi dalam penguasaan ilmu sangat dibutuhkan di dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM daerah sehingga memiliki daya saing untuk meningkatkan ekonomi daerah.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah bagaimana kiat, strategi serta yang harus dilakukan perguruan tinggi dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka berperan serta dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan daya saing antar konsultan manajemen dalam rangka membantu perusahaan untuk memecahkan serta membantu pengembangan bisnis perusahaan.

B. Landasan Teori

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun pengertian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan dalam undang-undang UMKM No. 20 tahun 2008 antara lain sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per-orangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) No. 20 Tahun 2008 pada Bab IV pasal 16 menetapkan kriteria UMKM sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau;
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: me-miliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) samapi dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).
 4. Saiman (2009) mendefinisikan UMKM dengan ciri antara lain: pendanaan disuplai oleh satu orang atau grup kecil, operasional bisnis yang terlokalisasi, ukuran bisnis yang cukup kecil jika dibandingkan dengan kompetitornya, dan memiliki kurang dari 100 karyawan.

Sedangkan menurut Rahmana (2008) adapun kriteria pengelompokan UMKM antara lain Pertama, *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kedua, *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Ketiga, *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor, dan keempat *Fast Moving Enterprise*, merupakam Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

C. Daya Saing Perekonomian Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang standar proses, mendefinisikan daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna. Kemampuan yang dimaksud adalah (1) kemampuan memperkokoh pangsa pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3)



kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, (4) kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan.

Abdullah dkk (2002) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan suatu perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Sedangkan Camagni (2002) mendefinisikan bahwa daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran.

Charles dan Benneworth dalam Kuncoro (2009) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan para anggota konstituen dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah untuk melakukan tindakan dalam bisnis yang berbasis di daerah tersebut menjual dengan tingkat nilai tambah yang lebih tinggi dalam persaingan internasional, dapat dipertahankan oleh aset dan institusi di daerah tersebut, dan karenanya menyumbangkan pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta *virtuous cycle* dampak pembelajaran.

D. Peran Perguruan Tinggi Terhadap Tridharma

Pendidikan merupakan sektor vital dalam pembangunan suatu negara. Kemajuan dan kualitas suatu negara juga ditentukan oleh kualitas pendidikan sumber daya manusia yang menjadi *stakeholder* dari suatu negara. Di dalam perguruan tinggi terdapat prinsip serta kewajiban yang dinamakan TriDarma Pendidikan, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dalam ayat 9 disebutkan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. sedangkan dalam Pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Serta pada ayat Pasal 4 ayat 4 disebutkan pula bahwa terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perguruan tinggi merupakan institusi penyelenggara pendidikan tinggi yang melahirkan sumber daya yang siap memberikan kontribusi pada negara

masyarakat dan negara. Menurut Effendi (2003) bahwa masyarakat sekarang mempercayakan kepada perguruan tinggi yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat dalam transformasi menuju masyarakat global.

Berdasarkan penjelasan UU RI Nomor 12 tahun 2012 maka perguruan tinggi wajib bersumbangsih di dalam pemberdayaan UMKM sebagai perwujudan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat dijadikan sebagai pusat dan sumber pengetahuan, melalui para akademisi dari perguruan tinggi selaku mitra pendamping UMKM di lapangan, maka proses pengabdian masyarakat terhadap para pelaku UMKM dapat terlaksana. Sedangkan Rasyid (2007) menyatakan bahwa perlunya dilakukan pemberdayaan oleh perguruan tinggi dengan dibantu oleh pemerintah dan pihak terkait sehingga UKM dapat berperan sebagai motor penggerak ekonomi.

E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009).

Adapun narasumber atau informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak berjumlah 3 orang yang terdiri atas satu orang akademisi di perguruan tinggi, satu orang mantan “pelaku” UMKM yang kini telah memiliki banyak usaha, serta seorang konsultan pendamping UMKM.

Tabel 2 Profil Subyek Penelitian

No	Nama	Profesi
1	Mr. Adhit	Akademisi
2	Mr. Jais	Mantan Pengusaha UMKM
3	Mr. Fahmi	Konsultan Pendamping UMKM

Sumber : Olahan Peneliti

F. Analisa dan Pembahasan

Perekonomian daerah mempunyai peran penting di dalam menunjang perekonomian suatu negara. Menurut Suryana (2000) keberhasilan suatu daerah dalam usaha membangun ekonomi daerah dipengaruhi beberapa faktor ekonomi, meliputi: sumber daya manusia (*labor supply, education, discipline, motivation*); sumber daya (*natural resources*); pembentukan modal (*capital*



formation); teknologi dan kewirausahaan(*technology and entrepreneurship*). Penelitian yang dilakukan Abdullah, dkk (2002) menyebutkan indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (1) Perekonomian daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem Keuangan, (4) Infrastruktur dan sumber daya alam, (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber daya manusia, (7) Kelembagaan, (8) *Governance* dan Kebijakan pemerintah, dan (9) Manajemen dan ekonomi mikro.

Menurut Soekarwo (2016) selaku Gubernur Jawa Timur mengungkapkan bahwa agar suatu daerah memiliki daya saing maka harus berfokus pada 3 hal yaitu *Quality*, *Cost*, dan *Delivery*. Pada sisi *Quality*, aktivitas yang perlu diperkuat adalah efisiensi proses, serta output yang dihasilkan berupa produk yang terstandarisasi. Pada sisi *Cost*, aktivitas yang perlu diperkuat adalah pembiayaan yang kompetitif (bunga murah/rendah), serta output yang dihasilkan adalah harga barang yang kompetitif di pasar. Pada sisi *Delivery*, aktivitas yang perlu diperkuat adalah *Logistics* dan *Connectivity*, serta output yang dihasilkan berupa produk yang dipesan cepat sampai ke tangan konsumen.

Keunggulan dari produk UMKM merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat luas, UMKM di Indonesia adalah merupakan usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal, sehingga gonjang ganjing ekonomi global tidak berpengaruh terhadap UMKM, ini dapat dibuktikan pada saat terjadi krisis tahun 1997/1998, dimana sektor UMKM tetap eksis di saat banyak usaha besar yang “gulung tilar”. UMKM di daerah mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang jika pengelolaan manajemen dikelola dengan baik. Menurut Fahmi selaku konsultan pendamping UMKM : *Selama ini sektor UMKM dipandang sebelah mata berbagai pihak tentang geliat usahanya, serta manajemen yang dijalankan UMKM selama ini masih bersifat tradisional, padahal banyak potensi yang dapat dikembangkan dari kemajuan UMKM.*

Di dalam menjalankan usahanya, para “pelaku” UMKM dihadapkan pada banyak sekali permasalahan. Menurut Okpara dan Wynn (2007) bahwa kendala yang dihadapi UMKM terdiri atas empat kategori yaitu pertama, kendala administratif antara lain akuntansi, keuangan, sumber daya manusia dan isu manajemen. Kedua, kendala operasional antara lain pemasaran, kontrol persediaan, produksi dan operasional. Ketiga, kendala strategik, yaitu perencanaan, riset pasar dan analisis finansial. Ertu yang keempat, kendala ekstrenal yaitu isu infrastruktur, korupsi, teknologi dan permintaan yang rendah. Menurut Jais, selaku mantan pengusaha UMKM : *Sebagian besar UMKM masih sulit mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usaha,*

dimana UMKM jarang dilirik pihak perbankan, tentu saja masalah ini berimbas terhadap produktivitas UMKM untuk dapat bersaing.

Di dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tidak bisa dilakukan sendiri atau bagaikan *single fighter*, diperlukan kolaborasi atau kerjasama berbagai pihak. Dalam rangka membantu meningkatkan daya saing UMKM di daerah kerjasama berbagai pihak. Menurut Nugraheni dan Suprihanto (2015) bahwa UMKM di Indonesia, khususnya di perbatasan dalam hal ini kabupaten Nunukan dapat berkembang dengan baik jika selalu dilakukan pendampingan dan kemitraan dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah (instansi atau dinas), universitas, sektor swasta dan masyarakat. Menurut Adhit selaku akademisi : *Perguruan tinggi yang memiliki banyak akademisi perlu melakukan kolaborasi dengan para praktisi yang selama ini berkecimpung di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti pengusaha yang dulunya UMKM lalu naik kelas menjadi Usaha Besar (UB), pengusaha yang pernah menjalankan UMKM lalu sekarang tidak aktif lagi sebagai penguasaha, serta para tenaga konsultan pendamping UMKM.*

Kolaborasi dari perguruan tinggi dengan berbagai pihak seperti para praktisi UMKM yang pernah menjadi “pelaku” maupun sekarang masih berkecimpung di dunia UMKM memiliki pengalaman di lapangan sehingga perlu dipadukan dengan para akademisi dari perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dan kekuatan di dalam teori, riset dan metodologi suatu ilmu sehingga dapat terjadi kolaborasi yang sesuai untuk pemberdayaan UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi di daerah. Menurut Fahmi selaku konsultan pendamping UMKM : *Pihak akademisi dan praktisi dapat menjadi pemberi masukan dari sisi lain atau second opinion kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan UMKM.* Adapun kolaborasi antara akademisi dan praktisi dapat membentuk suatu lembaga dilingkungan perguruan tinggi yang dapat dinamakan Lembaga Kajian Pemberdayaan (LKP) UMKM Daerah.

Setelah terjadinya kolaborasi dari pihak akademisi dan pihak praktisi dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kedua belah pihak perlu untuk menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintah daerah selaku regulator di daerah. Pihak perguruan tinggi beserta praktisi pendamping perlu untuk melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah, dimana memberi masukan kepada pihak pemerintah untuk selalu berpihak dan mendukung UMKM dari berbagai sisi seperti kebijakan insentif, kemudahan perizinan, maupun perbaikan infrastruktur transportasi. Salah satu yang dilakukan pihak pemerintah daerah dengan mengeluarkan kebijakan Deregulasi Bisnis dalam rangka meningkatkan lingkungan usaha melalui Penyederhanaan izin investasi,



penyaluran kredit usaha, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi.

Para pendamping UMKM perlu memiliki kompetensi khusus di dalam mendampingi UMKM. Untuk itu para pihak yang menjadi pendamping UMKM di Lembaga Kajian Pemberdayaan (LKP) UMKM Daerah perlu meningkatkan kompetensi kapasitas konsultan pendamping seperti kegiatan *update* perkembangan ilmu pengetahuan terbaru, *Training on Trainer* (TOT), studi banding dengan antar sesama pendamping UMKM di daerah lain bahkan dengan negara lain. Menurut Aribowo (2014) bahwa Adapun sarana peningkatan serta *update* tentang *knowledge, tools* dan Metodologi dalam memberikan *advice* kepada klien di bidang manajemen antara lain dengan mengikuti kegiatan seminar, *training*, serta mengikuti perkembangan dunia manajemen melalui buku, majalah, koran, majalah, jurnal ilmiah, internet dan televisi.

Adapun upaya Pemberdayaan terhadap UMKM yang dapat dilakukan Lembaga Kajian Pemberdayaan (LKP) UMKM Daerah, melalui kegiatan antara lain :

1. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui standarisasi keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Penataan administrasi di UMKM yang meliputi akuntansi, perpajakan serta dokumen penting yang terkait dengan UMKM.
3. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi manajemen secara teknis dari seperti strategi pemasaran, pengembangan inovasi desain, dan aspek legal hukum produk
4. Pemberdayaan Penguasaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dimana Studi dari Mckinsey (Dalam Top 50 UKM Go Online 2012) menyebutkan bahwa pelaku UKM yang menggunakan teknologi online akan tumbuh dua kali lipat dari yang lain, selain itu, melalui pemanfaatan internet, pelaku UKM dapat meningkatkan produktivitas usahanya sebesar 10%.
5. Riset Pasar dalam rangka melihat potensi bisnis UMKM
6. Perencanaan Skema pembiayaan yang kompetitif serta menggandeng pihak lembaga keuangan maupun perbankan agar dapat memberikan bunga rendah. Selain itu juga dapat menggandeng pelaku *financial technology (fintech)* untuk dapat berpartner dengan pelaku UMKM terutama dalam skema pembiayaan yang kompetitif.

G. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain :

1. Perlu dilakukan pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat daerah, akan tetapi di dalam pemberdayaan UMKM banyak kendala yang dialami oleh UMKM, untuk itu diperlukan kita dan strategi untuk mengatasi kendala yang dilamai UMKM
2. Sebagai perwujudan TriDharma pperguruan tinggi, maka pihak perguruan tinggi melalui akademisi perlu berkolaborasi dengan para praktisi UMKM seperti pengusaha yang suah naik kelas menjadi usaha besar, pengusaha yang pernah menjalankan UMKM, serta para konsultan manajemen pendamping UMKM membentuk Lembaga Kajian Pemberdayaan (LKP) UMKM Daerah di lingkungan perguruan tinggi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah selaku regulator daerah agar segala kebijakan dan peraturan dapat membantu memberdayakan potensi UMKM di daerah.
3. Lembaga Kajian Pemberdayaan (LKP) UMKM Daerah perlu melakukan banyak kegiatan dalam rangka membantu pemberdayaan UMKM seperti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penataan administrasi, pendampingan dan konsultasi manajemen, riset pasar, dan perencanaan skema pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Pieter., Alisjahbana, Armida, S., Effendi, N., Boediono, 2002. *Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
- Abeng, Tanri.2015. *BUMR Badan Usaha Milik Rakyat Lembaga Pelaku Ekonomi dan Keuangan Inklusif*. Elexmedia Komputindo. Jakarta
- Aribowo, Handy. 2014. *Gambaran Dan Upaya Peningkatan Daya Saing Perusahaan Konsultan Manajemen Dalam Menghadapi Asean Economic Community (Aec) 2015*. Prosiding Seminar Nasional dan Ekonomi dan Bisnis 2014 Universitas Jenderal Achmad Yani Materi Dipresentasikan 9 Oktober 2014
- Camagni, R., 2002. *On The Concept Of Territorial Competitiveness : Sound Or Misleading?* ERSA conference papers ersa02p518, European Regional Science Association.
- Charles, D,R dan Benneworth,P.S. 2000. *Clustering and Economic Complexity : Regional Clusters of The ICT Sector In The UK*. Paper dipresentasikan pada Do Clusters Matter In Innovation Policy ? OECD Cluster Group Workshop, Utrecht, Netherland, 8–9 May 2000
- Effendi, S. 2003. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*. 1–12. www.sofian.staff.ugm.ac.id diakses tanggal 13 Juli 2010.
- Kuncoro, Mudrajad 2009. *Ekonomika Indonesia : Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*” UPP STIM YKPN Yogyakarta



- Nugraheni, Agusta Ika Prihanti, dan Sprihanto, John 2015. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah : Studi Kasus Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara*. Makalah Dipresentasikan Dalam Prosiding Seminar Nasional dan Kongres ISEI XIX pada 7–9 Oktober 2015
- Okpara, J. dan Wynn, P. 2007. *Determinants of Small Business Growth Constraints in a Sub-Saharan African*. *Economy: Quarterly Journal. S.A.M. Advanced Management Journal*. 72(2): 25–35
- Rahmana, Arief. 2008. *Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi Terdepan tentang Usaha Kecil Menengah*, (online), (<http://infoukm.wordpress.com>, diakses 1 oktober 2011).
- Rasyid, R. 2007. *Keterkaitan Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Sumatra Barat*. *Jurnal Eksekutif*. (Vol. 4 No. 3): 217–230
- Soekarwo.2016. *“Strategi Penguatan Pembiayaan UMKM Untuk Meningkatkan Daya Saing Dan Pertumbuhan Inklusif”* Makalah Dipresentasikan Dalam Seminar Nasional Penguatan Perekonomian Nasional Dalam Menghadapi Ketidakpastian Global 11 Agustus 2016 yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Cabang Surabaya
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta Sutojo
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2008. Undang–Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta : Sekretariat Negara.